

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 17

## Seruan Koreksi Menguat (1)

Presiden: Dorong Peningkatan Kemampuan Ekonomi Petani

JAKARTA, KOMPAS — Seruan untuk mengoreksi subsidi pertanian, khususnya pupuk, menguat. Model yang berlangsung selama ini, yakni subsidi harga barang, terbukti tak efektif dan rawan rente. Demi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, subsidi sebaiknya langsung kepada petani.

"Secara prinsip tidak perlu ditanyakan lagi (subsidi langsung adalah yang paling efektif). Subsidi pupuk, boleh dibilang yang menikmati adalah pabrik pupuk. Terus terang, banyak perkebunan yang menikmatinya. Ini sama saja dengan subsidi tidak tepat sasaran. Kita harus beralih ke subsidi langsung," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (6/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian menyebutkan sejumlah permasalahan subsidi pupuk dan benih yang menyebabkan subsidi tidak efektif. Permasalahannya itu antara lain adanya celah korupsi.

Sementara dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester I-2016, Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan, pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Basis data luas baku lahan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, tidak akurat, dan tidak mutakhir.

Untuk beralih ke subsidi langsung, Bambang menekankan, dua prasyarat harus tuntas lebih dulu. Pertama, model subsidi langsung paling efektif harus ditetapkan. Kedua, pembangunan basis data petani yang komprehensif, kuat, akurat, dan dimutakhirkan secara reguler. Saat ini, menurut Bambang, sudah ada data petani, tetapi belum komprehensif.

Bappenas, ujarnya, dalam posisi mengusulkan subsidi pupuk diganti dengan subsidi langsung. Namun, keputusan akhir sepenuhnya merupakan keputusan tingkat tinggi.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan, subsidi pupuk selalu berkatat pada masalah tidak tepat sasaran, waktu, jumlah, dan mutu. Hal ini terus berulang di se-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 17

# Seruan Koreksi Menguat (2)

### BEBERAPA TEMUAN PELAKSANAAN SUBSIDI PUPUK

**KPK**  
Kesimpulan:

- 1 Pelaksanaan belum mampu mengantisipasi celah korupsi. Ini tergambar dalam mekanisme penetapan HPP yang membuka ruang transaksional.
- 2 Beban keuangan negara berpotensi membengkak akibat belum dipisahkannya pembebanan HPP bagi kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk produk bersubsidi dan pupuk komersial.
- 3 Pengawasan program subsidi belum melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan.

**Rekomendasi:**  
Kementerian Pertanian meredesain pola penyaluran pupuk dan benih bersubsidi secara langsung kepada petani.

Sumber: Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian (KPK) dan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Periode 2013 sampai dengan Semester I-2015 (BPK)/Diolah oleh LAS

### ANGGARAN SUBSIDI PUPUK DAN BENIH 2014-2017 (TRILIUN RUPIAH)

Tahun	Subsidi Pupuk (Triliun Rupiah)	Subsidi Benih (Triliun Rupiah)
2014	21	0,3
2015	39,5	0,9
2016	30,1	1
2017	31,2	1,2

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

**BPK**  
Kesimpulan:

- 1 Ketentuan subsidi pupuk dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kurang jelas dan kurang sinkron. Akibatnya, timbul potensi penyelewengan dalam pelaksanaannya.
- 2 Sumber data luas baku lahan sebagai acuan perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak valid. Sebab, basis data luas baku lahan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, tidak akurat, dan tidak mutakhir.
- 3 Pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat sasaran.

**Rekomendasi:**  
Perbaiki atas temuan persoalan.

INFOGRAFIK: ISMAWADI

**Buruh tani beristirahat di sela-sela memanen kacang hijau di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (5/9). Petani menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya modal dan rendahnya nilai produk pertanian.**

Pola distribusi pupuk bersubsidi, menurut Wijaya, sudah cukup baik mengantisipasi penyimpanan ke sektor lain.

**Perhatikan petani**

Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi berperan mendorong perwujudan konsolidasi petani. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perekonomiannya sehingga dapat menguasai sektor hulu ke hilir.

Dengan cara ini, Presiden meyakini, nilai tukar petani dapat meningkat secara signifikan.

Presiden mengatakan, konsolidasi petani adalah hal mendasar yang harus diwujudkan. "Kuncinya, bagaimana mengkonsolidasikan petani agar memiliki kemampuan ekonomi dalam skala besar. Konsolidasi itu dapat diwujudkan dengan melibatkan mereka dalam korporasi. Harus ada pemikiran besar ke arah sana," kata Presiden dalam orasi ilmiah Sidang Terbuka Dies Natalis Ke-54 Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB Herry Suhardiyan-to menyatakan komitmennya mendidik mahasiswa menjadi lulusan berkompentensi tinggi.

(MKN/FRN/LAS/NDY)

jumlah daerah. Akibatnya, subsidi tidak efektif, dengan salah satu indikator berupa petani yang terus hidup miskin.

"Selama subsidinya seperti sekarang, masalah rente yang parah akan terus terjadi. Saya minta pemerintah mengubah pola subsidi, bukan barang, melainkan subsidi harga jual. Yang penting ada mekanisme kontrol. Ini akan lebih efektif mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, subsidi langsung kepada petani merupakan ide bagus di tengah sejumlah persoalan subsidi pupuk. Namun, perubahan kebijakan dikhawatirkan dapat mengganggu fokus pemerintah dalam mengejar swasembada pangan nasional.

"(Subsidi pupuk secara langsung) Ada pemikiran, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan, bisa langsung diterapkan. Itu ide bagus, tetapi kita lihat situasinya dulu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana swasembada," kata Amran di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Corporate Communi-

cation PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menyatakan, sebagai operator, Pupuk Indonesia mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Terkait wacana mengubah pola subsidi, Pupuk Indonesia mengikuti keputusan pemerintah.

"Kami sedang mengembangkan produk ritel, menyeragamkan kios, memastikan produk nonsubsidi bisa diakses petani, dan memacu efisiensi agar produk bisa bersaing dengan produk impor. Jadi, bagaimana pun pola subsidi, kami sudah mempersiapkan diri," ujarnya.